

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR LANJUT USIA DI KELURAHAN KUNINGAN BARAT

Yuda Romadhon¹, Moh. Amin Tohari²

Email: yuda.ramadan70@gmail.com¹, amin.tohari@umj.ac.id²

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Abstrak: Permasalahan lansia merupakan permasalahan yang kompleks, salah satunya terkait pemenuhan kebutuhan dasar, serta kemunduran yang dialami oleh lanjut usia baik secara pola pikir, sikap, serta jiwa yang sudah tidak kembali seperti masa produktifnya, oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat program salah satunya dengan pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia, Faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia di Kelurahan Kuningan Barat, dan untuk mengetahui Pemenuhan Kebutuhan Dasar kebutuhan lanjut usia di Wilayah Kelurahan Kuningan Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Informan penelitian menggunakan purposive sampling dengan lima informan. Metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian implementasi peraturan gubernur meliputi komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi, serta faktor yang mempengaruhi kebijakan meliputi karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan, serta pemenuhan kebutuhan dasar meliputi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual.

Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Lanjut Usia.

Abstract: *The problem of the elderly is a complex problem, one of which is related to fulfilling basic needs, as well as the setbacks experienced by the elderly both in terms of mindset, attitude and spirit which no longer returns to its productive period, therefore the DKI Jakarta Provincial Government has created a program, one of which is fulfilling the basic needs of the elderly, factors that influence the implementation of the Social Assistance Policy for Fulfilling the Basic Needs of the Elderly in Kuningan Barat Subdistrict, and to find out the Fulfillment of Basic Needs for the elderly in the Kuningan Barat Subdistrict Area. This research uses a qualitative research method, a descriptive approach. Research informants used purposive sampling with five informants. Data collection methods use interviews and documentation studies. The results of research on the implementation of governor regulations include communication, resources, bureaucratic structure, and disposition, as well as factors that influence policy including problem characteristics, policy characteristics, and policy environment, as well as the fulfillment of basic needs including biological, psychological, social, and spiritual.*

Keywords *Implementation, Social Assistance, Fulfillment of Basic Needs, Elderly.*

PENDAHULUAN

Kelompok lanjut usia bukanlah kelompok yang sedikit di Indonesia, bahkan diprediksi semakin meningkat dari tahun ke tahun, terhitung dalam lima dekade terkait jumlah penduduk lanjut usia meningkat sekitar dua kali lipat, sekitar 9,6% atau sekitar 25 juta dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut lansia perempuan sekitar 1% lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki atau sekitar selisih 2,7 jiwa penduduk, jumlah tersebut akan meningkat menjadi 57,9 juta jiwa atau 17,9% pada tahun 2024, baik lansia secara produktif maupun tidak produktif. (BPS,2019).

Menurut Suardiman (2016) dalam F.Zwytha (2021) masalah psikologi yang

dialami lansia dapat berupa kesepian, terasing dari lingkungan, ketidak berdaya, perasaan tidak berguna, membuat seorang lansia kurang percaya diri, sehingga ketergantungan, dan mengalami ketelantaran berdampak pada lansia yang miskin. Dari masalah psikologi tersebut menurunnya kebahagiaan lansia bermasalah pada kesehatan fisik dan psikis yang terjadi dengan menurunnya kebahagiaan lansia yang menimbulkan penyakit seperti depresi dan gangguan emosional.

Pemerintah bersama masyarakat dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia, pelayanan yang diberikan pemerintah kepada lanjut usia yang potensial maupun non potensial. Upaya nyata untuk mencapai tujuan yang diamanatkan undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 yang dimanah telah banyak dilakukan melalui berbagai bentuk kebijakan, program dan bentuk kegiatan, baik dalam maupun luar panti sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, namun harus diakui kedua sistem pelayanan tersebut belum dapat sepenuhnya mengatasi seluruh permasalahan yang dihadapi para lanjut usia, sehingga perlu diciptakan alternatif model pelayanan yang bersifat komprehensif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat lingkungan.

Merujuk Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial bagian Perlindungan dan Jaminan Sosial meluncurkan program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) dengan bentuk Automatic Teller Machine (ATM) Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Program pemenuhan kebutuhan dasar diterbitkan sejak tahun 2018, dengan bertujuan mencegah penerima bantuan sosial dari risiko guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya terpenuhi, meningkatkan kesejahteraan penerima bantuan sosial, mewujudkan taraf kehidupan penerima bantuan sosial yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri serta bermartabat. Persyaratan utama dari penerima PKD adalah warga Jakarta berusia 60 Tahun ke atas, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), diusulkan melalui Musyawarah Kelurahan, bukan bagian dari pensiunan ASN/TNI/Polri serta BUMN. Sejak 2018-2022, 5 tahun berjalan penerima manfaat lanjut usia menerima nominal bantuan sebesar Rp. 600.000 tiap bulanya melalui rekening Bank DKI, akan tetapi pada tahun 2023 nominal tersebut berkurang mencapai sebesar Rp. 300.000 dengan beralasan lebih banyak penerima manfaat 2x lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah tabel distribusi PKD Lansia sejak tahun 2018 hingga 2023.

Pendistribusian Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia	
Tahun	Jumlah
2018	14.520
2019	40.419
2020	77.524
2021	78.169
2022	107.573
2023	219.448

Oleh karena itu, peran pemerintah dalam proses implementasi kebijakan Peraturan Gubernur adalah menyejahterakan rakyatnya atau warganya, seperti

semboyan slogan DKI Jakarta Maju Kotanya, Bahagia Warganya. Dengan demikian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah salah satu syarat tugas pokok utama terhadap bidang terkait seperti Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Pusat Data Informasi Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam mengataskan PMKS dengan kategori penanganan fakir miskin terutama terhadap lanjut usia.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research)), yaitu objek penelitian langsung pada wilayah Kelurahan Kuningan Barat Mampang Prapatan. Jenis penelitian yang sesuai dengan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif untuk bisa mendapatkan informasi dan pemahaman yang mendalam dengan menganalisis objek serta mampu menjelaskan, menjawab serta mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia di Kelurahan Kuningan Barat. Waktu Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2023 sampai dengan Januari 2024.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan melalui proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu dengan menentukan informan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh peneliti dengan sengaja. Sebanyak kurang lebih lima informan yang akan diwawancarai dan di observasi.

Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi Kriteria Kredibilitas, Kriteria Kepastika, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

HASL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia di Kelurahan Kuningan Barat

Sesuai dengan konsep implementasi kebijakan sebagai Upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia di kelurahan kuningan barat merupakan Upaya pemerintah untuk memecahkan permasalahan sosial khususnya pemenuhan kebutuhan dasar bantuan lanjut usia, yang merupakan masih saja realita sosialnya terdapat beberapa lansia yang belum terpenuhi pemenuhan kebutuhan dasar.

Tahapan setiap proses implementasi program bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar telah disebutkan secara jelas dan akan menjadi pedoman bagi Tindakan implementor kebijakan, oleh sebab itu dianalisis berdasarkan teori model implementasi kebijakan George C. Edward III, model implementasi kebijakan ini memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi empat model aplikasi teori Edward III, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Salah satu hal yang penting dalam implelementasi kebijakan ialah isi daripada kebijakan itu sendiri. Karena kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila

pelaksanaannya memahami isi daripada kebijakan sesuai pedoman yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil daripada penelitian dalam rangka implementasi pemenuhan pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia, maka dapat dikatakan bahwa sejauh ini yang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya menjalankan program pemenuhan kebutuhan dasar bantuan lanjut usia dengan tujuan dan sasaran yang jelas, agar dapat berjalan lancar dan efektif.

Karena pada dasarnya yang menjadi peran penting dalam tahapan komunikasi ialah petugas pendata dan pendamping sosial dengan para pemangku kepentingan program baik RT dan RW, dari hasil penelitian disebutkan bahwa proses komunikasi dalam penyampaian informasi dalam memberikan sosialisasi sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi masih ada beberapa temuan di lapangan terkait peran serta pemangku kepentingan kurangnya komunikasi dalam penyampaian informasi dan kejelasan dalam memberikan informasi salah satunya program yang sedang berjalan pemenuhan kebutuhan dasar.

b. Sumberdaya

Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam hal pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar yang terlibat Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya, dan UPT Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial hingga petugas Bank DKI sebagai bentuk pelaksanaan cairan dalam bentuk kartu ATM dan untuk keseluruhan tenaga baik yang berada di kelurahan sudah berjalan dengan baik hanya saja pengoptimalan kinerja untuk khusus petugas pendata dan pendamping sosial yang berada di wilayah Kelurahan khususnya Kuningan Barat dengan Tingkat Pendidikan petugas pendataan dan pendamping sosial di awal dibentuk dengan tamat minimal pendidikan SMA, untuk tahun setelah itu pendidikan minimal harus S-1 dengan lulusan umum.

c. Disposisi

Dalam implementasi program pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia, para pelaksana dalam menjalankan disposisi ditunjuk dari Tingkat provinsi hingga Tingkat kelurahan hingga berperan penting yaitu petugas pendata pendamping sosial. Tingkat komitmen dan kejujuran keinginan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengeluarkan SPTJM yang akan bertanggung jawab memberikan penilaian kelayakan untuk calon penerima manfaat pemenuhan kebutuhan dasar bantuan sosial lanjut usia.

d. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi program pemenuhan kebutuhan dasar, birokrasi yang dijalankan dalam ketersediaan SOP untuk menjaga integritas data agar tidak disebar luaskan terkait calon-calon penerima manfaat bantuan sosial lanjut usia, terkecuali pada pelaksanaan musyawarah kelurahan hanya kepengurusan RT dan RW. Selain itu perkembangan dalam birokrasi agar berjalannya suatu koordinasi baik dan lancar baik Tingkat pusat sampai dengan Tingkat kelurahan menjaga dalam keberhasilan suatu pelaksanaan program pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu hasil pada temuan dilapangan dapat disampaikan implementais kebijakan bantuan sosial dalam kasus aspek struktur birokrasi masih terdapat kurangnya koordinasi dari pihak pemangku kepentingan antara petugas dengan RT dan RW dengan proses pelaksanaan program lanjut usia tersebut.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia di Kelurahan Kuningan Barat

Tentunya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu implementasi kebijakan dalam program itu sendiri, dengan faktor utama dalam menjalankan

implementasi, lingkungan, sasaran, dan permasalahan. Peneliti menggunakan teori yang dapat mempengaruhi implementasi yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sebatier sebagai teori utama dengan teori pendukung yang dianggap relevan dengan pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia, baik beberapa faktor yang telah dilaksanakan dari karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

a. Karakteristik Masalah

Pada proses kebijakan tersebut pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia dalam berkelanjutan sebuah kebijakan, mengingat Masyarakat kepengurusan RT yang menjadi sasaran dalam pemahaman proses kebijakan tersebut maka implementor memberikan pemahaman dalam penyampaian dengan sangat hati-hati agar proses penyampaian tersebut akan lebih baik dan terhindar dari kesalahpahaman, akan tetapi permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara rampung dengan musyawarah kelurahan dengan keputusan Bersama secara muwafakat. Proses tersebut mengenai pemahaman antara Koordinator Kelurahan dan Pengurus RT terkait tentang program perlindungan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia. Serta perubahan perilaku yang diharapkan oleh implementor sebagai pelaksana dan pengurus RT dapat merubah sikap Masyarakat, terjadinya disfungsi sosial sebelum penerima manfaat tidak menerima manfaat tersebut, akan tetapi dengan adanya program tersebut harapan para pelaksana dapat bertujuan lebih baik dengan lanjut usianya.

b. Karakteristik Kebijakan

Tingkat komitmen yang dilakukan para pelaksana kepada kepengurusan RT merupakan komitmen pertanggung jawaban mutlak karena merupakan bagian daripada tujuan agar terhindar terjadinya yang tidak diinginkan seperti tidak subjektif, objektif, serta transparansi akuntabilitas dalam melakukan penentuan calon penerima manfaat.

c. Lingkungan Kebijakan

Karena pada dasarnya dapat diketahui bahwa kelompok kepengurusan RT merupakan Langkah intervensi terhadap keputusan yang telah dibuat oleh kebijakan pada program pemenuhan kebutuhan dasar, serta pelaksana koordinator kelurahan hanya mendampingi selama proses pelaksanaan program pemenuhan kebutuhan dasar.

KESIMPULAN

1. Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia di Kelurahan Kuningan Barat

Komunikasi mampu berkoordinasi dengan tepat kepada sasaran sebagai penerima informasi yang terlibat dalam program pemenuhan kebutuhan dasar baik kepengurusan RT dan RW serta petugas pendata dan pendamping sosial dengan sosialisasi sesuai pedoman petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.

Sumber daya yang lengkap dalam ini adanya sumber daya mausia untuk petugas yang menjalannya program implementasi kebijakan dengan kedudukannya sebagai petugas pendata dan pendamping sosial yang berada di kelurahan serta dengan para kepengurusan sebagai peran menjalankan sumber daya pada implementasi kebijakan, serta sumber dana anggaran berasal dari anggaran APBD

Disposisi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan meminta berkolaborasi dengan pihak intansi terkait untuk melancarkan suatu program data pada bantuan

memenuhi kebutuhan dasar untuk menyelaraskan data agar tidak tepat sasaran dalam menentukan calon penerima manfaat pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia.

Struktur birokrasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial ialah diawali dengan Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial bergandengan dengan Kepala Pusat Data dan Informasi, lalu oleh petugas pendata dan pendamping sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi penerima manfaat pemenuhan kebutuhan dasar dengan hasil calon penerima manfaat yang tidak layak dan layak untuk menerima manfaat pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia di Kelurahan Kuningan Barat

Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang pemberian bantuan sosial lanjut usia di Kelurahan Kuningan Barat yang terlaksana dari proses awal sampai dengan akhir baik proses sosialisasi, musyawarah kelurahan, pengelolaan data hasil muskel, sampai pembukuan rekening kolektif, faktor yang mempengaruhi implementasi meliputi karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan, dengan demikian berdasarkan hasil temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa yang bisa dilihat sebagai berikut:

a. Karakteristik masalah atau karakteristik kebijakan.

Pada kebijakan bentuk implementasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bantuan Sosial Lanjut Usia di Kelurahan Kuningan Barat, implementor mengalami kesulitan dalam teknis pelaksanaan program lanjut usia tersebut terkait salah satunya data, serta dari keseluruhan jumlah lanjut usia masih ada lansia yang belum terdaftar dalam DTKS, akan tetapi dari Keluarga Calon Penerima Manfaat dengan adanya bantuan sosial lanjut usia tersebut dapat merubah sikap masyarakat dengan salah satunya memberikan bentuk dalam merubah disfungsi sosialnya dengan menerima bantuan sebesar 300.000 yang diturunkan secara rapel dalam kurun waktu 3 bulan sekali selama 12 bulan jadi dalam 12 bulan menerima kurang lebih 4-5 kali jika dari tingkat pusat dan dari pihak Bank DKI mengalami gangguan teknis.

b. Lingkungan kebijakan

Pada kebijakan implementasi bentuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bantuan Sosial Lanjut Usia di Kelurahan Kuningan Barat, dukungan dari berbagai instansi dalam pelaksanaan program pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia tersebut menjadi salah satu kesuksesan indikator pada kebijakan tersebut karena kerja sama yang dilakukan ialah terkait data dengan memadankan data tersebut dengan berbagai dinas terkait dengan diketahuinya data tersebut memiliki aset bergerak dan aset tidak bergerak. Serta kejelasan dan konsistensi program sudah berjalan dari 4 tahun sebelumnya pada tahun 2019 sampai sekarang, serta realisasinya program dilakukan dengan cara BUREKOL dalam bentuk untuk melakukan pembukaan rekening secara kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggara, S.(2014). KEBIJAKAN PUBLIK. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA.
Bambang Suggono. (2016). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Basrowi dan Swandi.(2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
Gunawan, Imam. (2013). Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek. Jakarta: PT Bumi Aksara,
Indiahono, Dwiyanto. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta

Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Di Kelurahan Kuningan Barat

Gava Media.

Jan Takasihaeng, DGS. (2000). *Hidup Sehat Di Usia Lanjut*, Jakarta: Kompas Media.

Mading, F. (2015). *GAMBARAN KARAKTERISTIK LANJUT USIA YANG MENGALAMI INSOMNIA DI PANTI WERDHA DHARMA BAKTI PAJANG SURAKARTA*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mulyadi, D (2015). *Studi Kebijakan Publik Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik)*. Bandung: Alfabeta.

Sri Lestari Rahayu.(2012) *Bantuan Sosial Di Indonesia*. Bandung: Fokus Media.

Suardiman, S. (2011) *Psikologi Usia Lanjut*. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.

Sugiyono. (2018) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, e. (2015) *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. Bandung: Alfabeta.

Syahrudin. (2018) *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media.

Waluyo. (2007) *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)* Bandung: Mandar Maju.

Winarno, Budi. (2007) *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Med Press,

Yusran Lapanand. (2013) *Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

Bachri, Bachtiar S. (2010) *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1 (46-62).